

ISBN 978-634-96056-4-9 (PDF)



DASAR-DASAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sitti Hairani Idrus, Jen Surya, Muhammad Iqbal,
I Putu Yoga Bumi Pradana, Titis Srimurni, Rukiah Nggilu,
Apriyanto, Mokh. Hariyadi Eko Romadon,
Wilda Sumarsyah, Dwi Putranto Riau



DASAR-DASAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

**Sitti Hairani Idrus
Jen Surya
Muhammad Iqbal
I Putu Yoga Bumi Pradana
Titis Srimurni
Rukiah Nggilu
Apriyanto
Mokh. Hariyadi Eko Romadon
Wilda Sumarsyah
Dwi Putranto Riau**



CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

DASAR-DASAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis :

Sitti Hairani Idrus
Jen Surya
Muhammad Iqbal
I Putu Yoga Bumi Pradana
Titis Srimurni
Rukiah Nggilu
Apriyanto
Mokh. Hariyadi Eko Romadon
Wilda Sumarsyah
Dwi Putranto Riau

ISBN : 978-634-96056-4-9

Editor : Ari Novendra , M.Pd dan Gusmalia, S.Pd. Gr.

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni,S,pd,Gr

Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG

Nomor IKAPI 053/SBA/2024

Redaksi :

Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Website : <https://pustakainspirasi.com/>
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Publik dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Publik, Sejarah dan Perkembangan Administrasi Publik, Teori dan Pendekatan dalam Administrasi Publik , Birokrasi dalam Administrasi Publik, Organisasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Publik, Kepemimpinan dalam Administrasi Publik, Kebijakan Publik, dan Inovasi dan Reformasi Administrasi Publik.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK	1
1.1 Pengertian Administrasi Publik	1
1.1.1 Definisi Administrasi Publik Menurut Para Ahli	1
1.1.2 Karakteristik Administrasi Publik.....	2
1.1.3 Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Privat	4
1.2 Tujuan dan Fungsi Administrasi Publik	5
1.2.1 Tujuan Administrasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	5
1.2.2 Fungsi-Fungsi Utama Administrasi Publik	6
1.2.3 Relevansi Administrasi Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat	8
1.3 Ciri-Ciri Administrasi Publik.....	9
1.3.1 Fokus Pada Pelayanan Masyarakat.....	9
1.3.2 Keterlibatan Aktor-Aktor Publik dan Non-Publik....	10
1.3.3 Adanya Sistem Aturan dan Regulasi yang Mengikat.....	12
1.4 Objek Kajian Administrasi Publik.....	13
1.4.1 Organisasi Pemerintahan	13

1.4.2	Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik.....	15
1.4.3	Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat.....	16
1.5	Ruang Lingkup Administrasi Publik	17
1.5.1	Manajemen Publik (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan)	17
1.5.2	Birokrasi dan Pengambilan Keputusan	19
1.5.3	Etika dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik.....	21
	DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK.....25

2.1	Sejarah Administrasi Publik	25
2.2	Administrasi Publik pada Zaman Kuno dan Abad Pertengahan	26
2.2.1	Administrasi Publik pada Zaman Kuno	26
2.2.2	Administrasi pada Abad Pertengahan.....	28
2.2.3	Era Modern Awal (Abad ke-18 dan ke-19)	29
2.2.4	Administrasi Publik pada Abad ke-20	32
2.2.5	Administrasi Publik pada Era New Deal dan Pasca- Perang Dunia II	35
2.2.6	Era Neo-Liberalisme dan Administrasi Publik di Akhir Abad ke-20.....	36
2.2.7	Administrasi Publik di Abad ke-21	40
2.3	Perkembangan Administrasi Publik	41
2.3.1	Perkembangan Administrasi Publik pada Awal Abad	

ke-20	41
2.3.2 Perkembangan Administrasi Publik pada Pertengahan Abad ke-20.....	43
2.3.3 Administrasi Publik pada Akhir Abad ke-20	44
2.3.4 Administrasi Publik di Abad ke-21	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
BAB 3 TEORI DAN PENDEKATAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK.....	49
3.1 Konsep Dasar Administrasi Publik.....	50
3.1.1 Definisi Administrasi Publik menurut Para Ahli	50
3.1.2 Perbedaan Administrasi Publik dengan Administrasi Bisnis	52
3.1.3 Fungsi dan Peran Administrasi Publik dalam Pemerintahan.....	53
3.2 Teori-Teori Dalam Administrasi Publik.....	55
3.2.1 Teori Klasik	55
3.2.2 Teori Human Relations	60
3.2.3 Teori Sistem	62
3.2.4 Teori Kontingensi.....	64
3.2.5 Teori Baru dan Pendekatan Modern.....	66
3.3 Pendekatan Dalam Administrasi Publik	69
3.3.1 Pendekatan Klasik.....	69
3.3.2 Pendekatan Humanistik.....	70
3.3.3 Pendekatan Sistem.....	73

3.3.4 Pendekatan Kontingensi.....	74
3.3.5 Pendekatan Kelembagaan.....	75
3.4 Perbandingan Teori Dan Pendekatan Dalam Administrasi Publik.....	76
3.4.1 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Teori.....	77
3.4.2 Kesesuaian Teori dengan Kondisi dan Tantangan Administrasi Publik Saat Ini.....	78
3.4.3 Integrasi Beberapa Teori dan Pendekatan dalam Praktik.....	78
3.5 IMPLIKASI TEORI DAN PENDEKATAN DALAM PRAKTIK ADMINISTRASI PUBLIK.....	79
3.5.1 Penerapan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia.....	79
3.5.2 Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik.....	80
3.5.3 Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik.....	80
3.5.4 Pengembangan Kapasitas dan Reformasi Birokrasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB 4 BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	85
4.1 Pengertian Birokrasi: Dari Etimologi ke Pengertian Ilmiah.....	86
4.2 Evolusi Konsep Birokrasi: Klasik hingga Kontemporer..	88
4.3 Ciri-ciri Birokrasi Menurut Max Weber dan Kritiknya....	90
4.4 Birokrasi sebagai Struktur Organisasi vs. Birokrasi	

sebagai Perilaku	93
4.5 Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
BAB 5 ORGANISASI PUBLIK	99
5.1. Pendahuluan	99
5.2 Pengertian Organisasi Publik	100
5.3 Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta	101
5.4 Mengapa diperlukan Organisasi Publik	104
5.5 Organisasi Publik di Indonesia	106
5.6 Fungsi dan Peran Strategis Organisasi Publik di Indonesia	109
5.7 Tantangan Organisasi Publik di Indonesia.....	113
5.8 Dinamika Organisasi Publik di Indonesia	115
DAFTAR PUSTAKA	118
BAB 6 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	119
6.1 Pendahuluan	119
6.2 Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sektor publik.....	119
6.3 Perkembangan Konsep dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia	122
6.4 Kontribusi Model Organisasi dan Permasalahan yang Muncul.....	129
6.5 Organisasi Publik	130

6.6 Perbedaan Manajemen Organisasi Publik dan Swasta	131
6.7 Manajemen Publik VS Administrasi publik	133
6.8 Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik	136
6.9 Arti dan Pentingnya Manajemen Pegawai Negeri	137
6.10 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil	143
DAFTAR PUSTAKA	150
BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK.....	151
7.1 Pendahuluan	151
7.2 Peran Teknologi dan Informasi dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Publik	156
7.3 Inovasi dalam Pengambilan Keputusan Administrasi Publik	160
7.4 Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Publik dan Lingkungan Hidup.....	165
7.5 Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Publik dan Kesehatan Masyarakat	169
7.6 Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Publik dan Keamanan Nasional	173
DAFTAR PUSTAKA	177
BAB 8 KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK.....	183
8.1 Pendahuluan	183
8.2 Pengertian	186

8.3 Pemimpin adalah Pelayan Publik.....	190
8.4 Dramaturgi Kepemimpinan Era Media Sosial	199
8.5 Penutup.....	201
DAFTAR PUSTAKA.....	204
BAB 9 KEBIJAKAN PUBLIK	207
9.1 Pengertian dan Karakteristik Kebijakan Publik	207
9.1.1 Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.....	207
9.1.2 Karakteristik Utama Kebijakan Publik.....	208
9.1.3 Peran Negara dalam Pembuatan Kebijakan	209
9.2 Proses Formulasi Kebijakan Publik.....	210
9.2.1 Identifikasi Masalah Publik.....	210
9.2.2 Perumusan Alternatif Solusi.....	212
9.2.3 Analisis dan Pemilihan Kebijakan.....	214
9.3 Implementasi Kebijakan Publik	215
9.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	215
9.3.2 Peran Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan....	217
9.3.3 Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	218
9.4 Evaluasi Kebijakan Publik.....	219
9.4.1 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kebijakan	219
9.4.2 Metode Evaluasi Kebijakan (Kualitatif dan Kuantitatif)	221
9.4.3 Indikator Keberhasilan Kebijakan Publik.....	222

9.5 Aktor dan Lingkungan Kebijakan Publik.....	224
9.5.1 Peran Pemerintah, LSM, Swasta, dan Masyarakat	224
9.5.2 Pengaruh Politik dan Ekonomi Terhadap Kebijakan	226
9.5.3 Dinamika Media dan Opini Publik dalam Proses Kebijakan	227
DAFTAR PUSTAKA.....	230
BIODATA PENULIS	231

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1

Model Manajemen.....123

Tabel 6.2

Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia.....125

Tabel 6.3

Fungsi dan Tugas Utama Manajemen Kepegawaian Negara.....126

Tabel 6.4

Perbedaan antara Sektor Publik dan Sektor Masyarakat.....132

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh : Dr. Sitti Hairani Idrus, S.Sos., M.Si

1.1 Pengertian Administrasi Publik

1.1.1 Definisi Administrasi Publik Menurut Para Ahli

Administrasi publik merupakan bidang keilmuan yang cukup kompleks dan memiliki banyak definisi, tergantung dari sudut pandang dan fokus masing-masing ahli. Menurut Siagian (2008), administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik meliputi berbagai aktifitas yang dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan, menyediakan layanan kepada masyarakat, serta memastikan keberlangsungan organisasi pemerintahan itu sendiri (Nuraini & Sawir, 2020). Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan administrasi formal, tetapi juga mencakup proses-proses yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Felix A. Nigro dan Loyd G. Nigro mendefinisikan administrasi publik sebagai proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasikan dan dikolaborasikan untuk memformulasikan, melaksanakan, dan

mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Definisi ini menandai bahwa administrasi publik lebih dari sekadar pelaksanaan kebijakan, tetapi juga melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian, dan evaluasi kebijakan secara menyeluruh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai hasil yang efektif dan efisien Rodiyah, 2021).

Sementara itu, menurut Pasolong (2013), administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik yang berperan penting dalam proses politik dan penciptaan kebijakan melalui kerja sama kelompok dan hubungan antar lembaga pemerintahan. Di sisi lain, Siagian (2008) menambahkan bahwa administrasi publik harus dilihat sebagai suatu kegiatan yang menyeluruh dan terintegrasi yang berupaya mencapai tujuan negara dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, pengertian administrasi publik secara umum menyiratkan sebuah proses yang kompleks dan multidimensi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat (Nuraini & Sawir, 2020).

1.1.2 Karakteristik Administrasi Publik

Karakteristik administrasi publik sangat beragam dan mencerminkan sifatnya sebagai sebuah disiplin ilmu serta praktik di lapangan. Salah satu karakter utama dari administrasi publik adalah bahwa ia bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Sistem administrasi publik harus mampu beradaptasi terhadap kompleksitas aktivitas

pemerintahan yang semakin meningkat, seperti perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan globalisasi yang memengaruhi seluruh proses pemerintahan.

Selain itu, administrasi publik memiliki karakteristik yang bersifat multidisipliner, yang berarti bahwa bidang ini tidak hanya melibatkan aspek administratif saja tetapi juga menyangkut ilmu politik, ekonomi, hukum, hingga sosiologi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi publik harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek tersebut agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien. Karakter ini menjadikan administrasi publik memiliki pendekatan yang kompleks dan terintegrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pemerintahan.

Karakteristik lain yang penting adalah bahwa administrasi publik merupakan proses yang berorientasi pada pelayanan. Tujuan utama dari administrasi publik adalah menyediakan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, proses ini dikedepankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan langsung dan memperoleh kepercayaan dari publik. Pendekatan yang berorientasi pada pelayanan ini juga mencerminkan bahwa administrasi publik harus mampu berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyatnya.

1.1.3 Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Privat

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara administrasi publik dan administrasi privat, yang berkaitan dengan tujuan, proses, dan karakteristik keduanya. Pertama, dari segi tujuan, administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat luas, sementara administrasi privat lebih berorientasi pada keuntungan dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Administrasi publik bekerja demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik, dan keberlangsungan negara, sedangkan administrasi privat lebih berfokus pada efisiensi dan profitabilitas perusahaan atau organisasi swasta.

Kedua, dalam hal proses pengambilan keputusan dan regulasi, administrasi publik diatur oleh aturan-aturan hukum dan kebijakan formal yang bersifat tetap dan formal; keputusan diambil melalui prosedur yang terstruktur dan biasanya melibatkan aparat atau lembaga negara sebagai pengambil kebijakan. Sebaliknya, administrasi privat cenderung lebih fleksibel dan dinamis dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan bisnis dan pasar, serta prosesnya lebih bersifat organisatoris dan komersial.

Ketiga, dari segi karakteristik, administrasi publik bersifat lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat dan pemangku kepentingan umum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sedangkan administrasi privat cenderung lebih tertutup dan

berorientasi pada efisiensi organisasi dan keberlangsungan bisnis, dimana keputusan diambil untuk mencapai target finansial dan keberhasilan jangka panjang organisasi.

1.2 Tujuan dan Fungsi Administrasi Publik

1.2.1 Tujuan Administrasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk menjamin bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi terciptanya layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Administrasi publik berperan sebagai penggerak utama yang mengkoordinasikan seluruh proses pengambilan kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara secara optimal, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Tujuan administrasi publik juga melibatkan aspek pembangunan masyarakat, dimana pelayanan terhadap masyarakat menjadi aspek yang sangat vital. Administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan benar-benar diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya administrasi yang baik, diharapkan program pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, memenuhi prinsip-prinsip good governance, dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Oleh

karena itu, pelaksanaan tujuan ini sejalan dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, tujuan administrasi publik tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan urusan negara secara formal, tetapi juga untuk mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera dan adil. Administrasi publik harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial, secara cepat dan tepat. Dengan demikian, tujuan terakhir dari administrasi publik adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya, yang mampu berkembang secara mandiri dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan publik. Secara umum, keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2.2 Fungsi-Fungsi Utama Administrasi Publik

Fungsi utama dari administrasi publik mencakup sejumlah proses penting yang saling terkait, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Fungsi ini menjadi fondasi dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan publik secara efektif. Salah satu fungsi utama adalah perencanaan kebijakan, yakni proses merumuskan rencana aksi yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui perencanaan yang matang, administrasi publik dapat

memusatkan sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain perencanaan, fungsi pengorganisasian juga memegang peranan penting dalam membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dalam praktek pemerintahan, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penentuan kewenangan, serta penataan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Fungsi ini bertujuan agar setiap bagian dalam institusi pemerintahan mampu bekerja secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga proses pelayanan publik dapat berjalan lancar tanpa adanya tumpang tindih tugas atau kebocoran sumber daya. Dengan pengorganisasian yang baik, administrasi publik mampu menciptakan suatu sistem kerja yang mampu menjamin ketepatan waktu dan mutu pelayanan.

Fungsi lainnya adalah pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirancang diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan operasional di lapangan. Sementara pengendalian bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, selain melakukan evaluasi dan perbaikan bila diperlukan. Pengawasan ini penting agar kerusakan, penyimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan publik dapat terjamin. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini memastikan bahwa administrasi publik mampu menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat dan memenuhi kepentingan publik secara profesional.

1.2.3 Relevansi Administrasi Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Relevansi administrasi publik terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar dan fundamental. Administrasi publik berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan sosial. Tanpa sistem administrasi yang efektif, pelayanan publik akan sulit dijalankan secara optimal, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan warga negara. Administrasi yang kompeten mampu mengelola sumber daya secara tepat guna, serta memfasilitasi tersedianya layanan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Administrasi publik juga berfungsi sebagai mekanisme yang mengintegrasikan berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat. Melalui proses perumusan dan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga, administrasi publik mampu memperkuat stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam era modern ini, keberhasilan administrasi publik menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan nasional dan penegakan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, keberadaan administrasi publik bertindak sebagai jembatan yang memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara terlindungi dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

1.3 Ciri-Ciri Administrasi Publik

1.3.1 Fokus Pada Pelayanan Masyarakat

Administrasi publik memiliki karakteristik utama yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari berbagai kegiatan administrasi dalam sektor publik adalah memenuhi hak dan kebutuhan warga negara secara efektif, efisien, dan adil. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan atau profit, melainkan lebih mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat secara umum. Dengan demikian, administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pelayanan yang memenuhi standar dan kriteria tertentu, sesuai dengan kebutuhan publik.

Pelayanan masyarakat dalam administrasi publik meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, perhubungan, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Setiap layanan ini harus diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat merasa memperoleh manfaat yang maksimal. Fokus ini menuntut adanya persepsi bahwa administrasi publik tidak berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan pada pelaksanaan tugas pengabdian dan penyediaan layanan yang berkualitas demi kepentingan umum. Hal ini juga menuntut aparat administrasi untuk senantiasa memperhatikan hak asasi, keadilan, dan kesetaraan dalam memberikan layanan.

Perhatian terhadap pelayanan masyarakat semakin berkembang, karena kebutuhan dan harapan publik terhadap layanan pemerintah semakin kompleks dan beragam. Hal ini

memaksa pemerintah dan institusinya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Pelayanan yang prima dan responsif menjadi tolok ukur keberhasilan administrasi publik, karena keberhasilannya akan sangat menentukan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dari administrasi publik adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional.

Aspek pelayanan ini juga memerlukan pemantauan dan evaluasi yang sistematis agar selalu adanya perbaikan berkesinambungan. Pelayanan yang berorientasi pada masyarakat menuntut profesionalisme dan integritas sebagai fondasi utama dari pelaksanaan tugas. Setiap pegawai administrasi harus memiliki komitmen untuk melayani tanpa diskriminasi dan memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh hak mereka secara adil dan merata. Dengan demikian, fokus pada pelayanan masyarakat secara aktif mendorong transparansi, akuntabilitas, serta usaha untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

1.3.2 Keterlibatan Aktor-Aktor Publik dan Non-Publik

Keterlibatan aktor-aktor dalam administrasi publik merupakan aspek penting yang membedakannya dari bidang lainnya. Dalam praktiknya, administrasi publik tidak hanya melibatkan pegawai pemerintah sebagai pelaksana tugas utama, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain baik dari kalangan publik maupun non-publik. Aktor publik meliputi

pejabat pemerintah, lembaga legislatif dan eksekutif, serta pejabat administratif yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Mereka memainkan peran sentral karena berkaitan langsung dengan proses pembuatan sekaligus pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Selain aktor publik, peran serta aktor non-publik, seperti masyarakat sipil, organisasi masyarakat, media massa, serta sektor swasta, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari administrasi publik. Keterlibatan aktor non-publik ini penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui partisipasi aktif berbagai aktor ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini juga memperkuat prinsip keberpihakan dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Di era digital saat ini, keterlibatan aktor mulai diperluas dengan adanya partisipasi melalui platform online dan media sosial. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah pun harus mampu mengelola dan memanfaatkan keterlibatan ini secara efektif agar kebijakan yang dihasilkan lebih transparan dan akuntabel. Keterlibatan ini juga menuntut adanya keterbukaan dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang mampu mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih, terbuka, dan responsif terhadap

kebutuhan dan harapan publik.

Selain aspek demokratis, keterlibatan aktor-aktor ini juga bisa membantu dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai watchdog yang aktif menuntut akuntabilitas, integritas, dan transparansi dari aparatur pemerintah. Administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai proses internal semata, tetapi juga sebagai sistem yang melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi secara aktif untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

1.3.3 Adanya Sistem Aturan dan Regulasi yang Mengikat

Ciri utama lainnya dari administrasi publik adalah keberadaan sistem aturan dan regulasi yang bersifat mengikat. Sistem ini berfungsi sebagai fondasi legitimasi dari seluruh kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya. Aturan dan regulasi ini mencakup berbagai norma hukum, peraturan perundang-undangan, tata tertib, serta standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi dalam setiap proses administrasi. Keberadaan sistem ini sangat penting untuk menjamin tertib, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Sistem aturan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pegawai administratif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengendalikan, mengatur, serta memberikan sanksi apabila ada pelanggaran.

Dengan adanya sistem regulasi yang jelas dan tegas, maka pelaksanaan kegiatan administratif menjadi lebih teratur dan terprediksi. Selain itu, sistem ini juga mendukung terwujudnya prinsip keadilan dan pemerataan layanan, karena setiap warga negara memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh aturan tersebut.

Keberadaan sistem aturan dan regulasi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam praktiknya, aturan yang jelas akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga pengawasan lainnya bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi aturan ini sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Dengan demikian, keberadaan sistem aturan dan regulasi yang mengikat menjadi fondasi utama yang menjaga integritas dan keberlangsungan sistem administrasi publik secara keseluruhan.

1.4 Objek Kajian Administrasi Publik

1.4.1 Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan merupakan salah satu objek utama dalam kajian administrasi publik. Dalam praktiknya, organisasi pemerintahan terdiri dari berbagai lembaga, departemen, dan unit-unit administratif yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan mandat undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Struktur organisasinya dirancang sedemikian rupa agar mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Setiap organisasi tersebut memiliki hierarki dan prosedur yang mengarahkan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Secara teoritis, organisasi pemerintahan juga mencerminkan sistem administrasi negara yang diatur oleh aturan dan norma-norma tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, organisasi pemerintahan adalah institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan organisasinya tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga mencakup proses kerja sama, koordinasi, serta integrasi antara unit-unit di dalamnya agar tercipta sinergi dalam pengelolaan pemerintahan.

Organisasi pemerintahan senantiasa mengalami dinamika dan perubahan mengikuti perkembangan zaman, termasuk penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat, teknologi, serta perubahan kebijakan nasional dan global. Oleh karena itu, kajian tentang organisasi pemerintahan tidak hanya berorientasi pada aspek struktural, tetapi juga pada aspek proses dan budaya organisasional yang mampu mendorong tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap organisasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

1.4.2 Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik

Proses kebijakan dan pelayanan publik merupakan ciri khas dari administrasi publik sebagai bidang studi yang fokus pada pengelolaan urusan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Proses ini dimulai dari perumusan kebijakan yang mencakup serangkaian tahap, mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan evaluasi. Dalam proses ini, berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah, stakeholder, dan masyarakat berperan secara aktif untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan akurat, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Transformasi kebijakan menjadi tindakan nyata memerlukan koordinasi antara berbagai unit dan lembaga yang terkait, serta penggunaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Proses ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah perlu mampu melakukan penyesuaian terhadap feedback dari masyarakat dan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas

Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari proses kebijakan, karena merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Pelayanan ini meliputi berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, hingga pelayanan administrasi lainnya yang terkait langsung dengan kebutuhan

masyarakat. Pelayanan publik yang prima harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses kebijakan dan pelayanan publik merupakan objek kajian inti dalam administrasi publik yang bertujuan tidak hanya memenuhi fungsi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1.4.3 Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan aspek penting dalam kajian administrasi publik karena merepresentasikan inti dari pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern menuntut adanya interaksi yang proporsional dan berkelanjutan antara pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan ini harus berlangsung secara efektif, transparan, dan dua arah dimana pemerintah tidak hanya bertugas sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga harus mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat secara aktif.

Interaksi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, partisipasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah sebagai pengelola urusan negara harus mampu menyediakan saluran yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritikan, maupun keinginan mereka. Pada saat yang

sama, masyarakat harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui forum, musrenbang, maupun mekanisme lainnya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dan saling mendukung akan meningkatkan legitimasi pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan.

Hubungan ini juga memunculkan aspek akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik melalui berbagai bentuk laporan dan publikasi yang transparan. Sebaliknya, masyarakat diharapkan turut aktif dalam mengawasi dan memonitor jalannya pemerintahan serta pelayanan yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Secara keseluruhan, hubungan pemerintah dan masyarakat ini menjadi fondasi utama dari keberhasilan administrasi publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

1.5 Ruang Lingkup Administrasi Publik

1.5.1 Manajemen Publik (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan)

Manajemen publik merupakan salah satu aspek terpenting dalam kerangka kerja administrasi publik. Secara umum, manajemen publik mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perencanaan adalah langkah awal yang sangat vital, karena di dalamnya terdapat penentuan arah kebijakan serta penetapan kegiatan atau program yang harus dilaksanakan. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengorganisasian merupakan proses mengatur sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi, agar dapat bekerja secara koordinatif dan terintegrasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di dalam pengorganisasian, struktur organisasi sangat berperan dalam menentukan jalur komunikasi, pembagian tugas, dan kewenangan yang jelas. Setiap unit kerja perlu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik agar seluruh proses berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, pengorganisasian yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelayanan publik.

Pengawasan adalah tahap akhir dalam manajemen publik yang menitikberatkan pada pengendalian dan evaluasi dari seluruh proses yang berjalan. Tahap ini menjamin bahwa pelaksanaan program dan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu menyesuaikan apabila terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan. Melalui pengawasan yang ketat dan sistematis, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya

digunakan secara optimal dan keberhasilan setiap program dapat terukur. Pengawasan yang efektif juga penting untuk mempertahankan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Manajemen publik tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan operasional, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dan transparansi agar tercipta sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Manajemen publik turut berperan dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas, sehingga mampu menghadirkan layanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Dengan kata lain, manajemen publik adalah fondasi utama dalam memastikan bahwa pemerintah mampu memenuhi tuntutan masyarakat secara efektif, efisien, dan berintegritas.

1.5.2 Birokrasi dan Pengambilan Keputusan

Birokrasi merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur administrasi publik yang berfungsi sebagai sistem formal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara klasik, birokrasi dikembangkan untuk menciptakan struktur organisasi yang rasional, terstandarisasi, dan berorientasi pada aturan yang sistematis dalam rangka melakukan pelayanan dan implementasi kebijakan publik. Konsep birokrasi Weberian menekankan karakteristik seperti hierarki yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, kedisiplinan pegawai, serta tertib dalam prosedur dan proses kerja yang harus diikuti secara disiplin dan konsisten.

Keberadaan birokrasi bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat pemerintahan dilakukan secara rasional dan berlandaskan regulasi yang berlaku. Birokrasi yang efektif mampu memberikan stabilitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjamin terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi birokrasi saat ini adalah kecenderungan birokrasi menjadi lamban, kaku, dan birokrat sulit beradaptasi terhadap perubahan, sehingga membutuhkan reformasi birokrasi yang mampu menjawab tantangan baru tersebut.

Keputusan di tingkat birokrasi tidak dapat diambil secara sembarangan, tetapi harus berdasar pada analisis data yang lengkap, prosedur standar, dan aturan yang berlaku. Selain itu, pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal seperti tekanan politik, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Di era reformasi birokrasi, pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara lebih transparan dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Pengambilan keputusan di birokrasi harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan faktor risiko yang ada. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi guna memastikan proses pengelolaan pemerintahan berjalan

secara optimal dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengambilan keputusan yang berbasis data, teknologi, dan partisipasi publik menjadi semakin penting dalam reformasi birokrasi saat ini. Dengan demikian, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mesin administratif, tetapi juga sebagai pengelola kebijakan dan penyelenggara layanan yang transparan dan bertanggung jawab.

1.5.3 Etika dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Aspek etika dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan di kalangan aparatur sipil negara maupun lembaga pemerintah lainnya. Etika menuntut pegawai dan pengelola pemerintahan untuk bertindak secara jujur, adil, dan tidak memihak, sesuai dengan norma moral dan nilai-nilai kejujuran serta keadilan sosial. Pengamalan etika ini sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, serta mampu membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Etika dalam administrasi publik tidak hanya berorientasi pada sifat kepribadian individu, tetapi juga terkait dengan budaya organisasi dan sistem norma yang berlaku dalam lembaga pemerintahan. Pegawai yang berpegang teguh pada etika akan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan keadilan sosial. Dalam era modern saat ini, penerapan etika menjadi semakin penting karena

berhubungan langsung dengan isu-isu besar seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan moral dan etika melalui pelatihan, pengawasan, dan sistem insentif sangat diperlukan agar citra pemerintahan tetap terjaga.

Keterlibatan akuntabilitas dalam administrasi publik sangat berkaitan dengan prinsip transparansi, responsible government, dan kontrol sosial. Akuntabilitas mengharuskan aparatur pemerintahan untuk bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan keputusan yang diambilnya terhadap masyarakat dan lembaga yang berwenang. Sistem akuntabilitas dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang transparan, evaluasi kinerja, audit internal maupun eksternal, serta mekanisme pengawasan yang efektif oleh masyarakat maupun lembaga pengawas negara. Dengan adanya akuntabilitas, setiap aparat pemerintah akan merasa sadar akan tanggung jawabnya, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola yang bersih dan efektif.

Akuntabilitas juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan integritas dari para pengelola pemerintahan. Hal ini penting untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyimpangan lain yang dapat merusak citra institusi. Implementasi etika dan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat legitimasi kelembagaan negara, dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kedua aspek ini merupakan fondasi penting yang harus terus dipupuk dan

dikembangkan demi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, H. S. (2017). Filsafat ilmu Administrasi Sebagai Hakikat dan Makna dalam Keilmuan Administrasi Publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 31–42.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2020). Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In R. R. Rerung (Ed.), *Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1)*. Media Sains Indonesia. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Oktavia, Y., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2024). Rekonstruktif: Kritik Terhadap Positivisme dalam Filsafat Ilmu dan Relevansinya untuk Perkembangan Studi Administrasi Publik. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 248–255. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.77105>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik UMSIDA PRESS*. UMSIDA PRESS.
- Winarno, B. H., & Laurens, S. (2024). Analisis Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Administrasi Publik di Indonesia. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(10), 12107–12112.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh: Dr. Jen Surya, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

2.1 Sejarah Administrasi Publik

Sejarah administrasi publik bermula dari kebutuhan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara terorganisir. Pada zaman kuno, sistem administrasi sudah ada di berbagai peradaban besar seperti Mesir, Romawi, dan Tiongkok, di mana raja atau kaisar menunjuk pejabat untuk mengatur wilayah dan mengelola sumber daya.

Namun, sebagai bidang ilmu, administrasi publik mulai berkembang secara sistematis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Tokoh penting seperti Woodrow Wilson dianggap sebagai “bapak administrasi publik modern” karena menulis esai penting pada tahun 1887 yang membedakan antara politik dan administrasi, menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan.

Selanjutnya, teori dan praktik administrasi publik terus berkembang dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan klasik, human relations, hingga teori sistem dan baru-baru ini fokus pada tata kelola (governance) dan pelayanan publik yang lebih partisipatif dan transparan.

2.2 Administrasi Publik pada Zaman Kuno dan Abad Pertengahan

2.2.1 Administrasi Publik pada Zaman Kuno

Pada zaman kuno, administrasi publik diidentikan dengan pengelolaan kekuasaan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban dan mengatur perekonomian masyarakat. Di Mesir Kuno, Babilonia, dan China, administrasi sudah diterapkan dengan adanya sistem pengumpulan pajak dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Sebagai contoh, di Mesir Kuno, administrasi dipimpin oleh seorang farao yang memiliki kuasa absolut. Pada masa ini, administrasi publik lebih berfungsi untuk mendukung kepentingan raja dan mengatur keuangan negara melalui pencatatan sumber daya, pembagian hasil pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Hal serupa juga berlaku di Mesopotamia, di mana kerajaan memanfaatkan sistem birokrasi yang awal untuk mengatur distribusi sumber daya dan kepentingan ekonomi lainnya.

Di Yunani Kuno dan Roma, administrasi lebih terfokus pada sistem hukum dan pengelolaan militer. Sistem administratif Romawi yang disebut "Cursus Honorum" adalah dasar dari perkembangan birokrasi, karena memberikan peran penting kepada pejabat yang memiliki pengetahuan tertentu dalam memerintah.

1. Ciri-ciri Administrasi Publik Masa Klasik

Era ini dikenal juga dengan Era Klasik, beberapa ciri era klasik adalah:

- a. Dominasi Kekuasaan Pribadi: Administrasi publik lebih merupakan pelaksanaan kehendak penguasa atau raja tanpa mekanisme formal yang sistematis.
- b. Belum Ada Birokrasi Rasional: Struktur pemerintahan masih bersifat informal dan berdasarkan hubungan patron-klien.
- c. Pengelolaan Tradisional dan Adat: Banyak kebijakan dan pelaksanaan yang mengikuti tradisi dan norma-norma sosial serta agama.
- d. Tidak Ada Pemisahan Politik dan Administrasi: Kedua aspek ini masih menyatu dan sulit dibedakan.
- e. Administrasi Sebagai Pelayanan Penguasa: Fungsi utama adalah menjaga kekuasaan dan mengelola sumber daya untuk kepentingan penguasa.

2. Tokoh dan Pemikiran

Meskipun masa ini belum melahirkan teori administrasi formal, beberapa pemikiran awal dan praktik yang berpengaruh dapat dilihat pada:

- a. Kaisar Romawi dan Administrasi Romawi: Administrasi yang terorganisir dengan struktur tertentu, misalnya pembagian fungsi administrasi sipil dan militer.
- b. Konfusius di Tiongkok: Mengajarkan pentingnya moralitas dan etika dalam pemerintahan serta pentingnya pegawai negeri yang berkompeten, yang menjadi dasar meritokrasi di masa depan. "Governance must be based on morality and merit, not on birth or wealth."

- c. Niccolò Machiavelli (1469-1527): Walaupun lebih dikenal sebagai ahli politik, Machiavelli mengamati pentingnya struktur dan disiplin dalam pemerintahan yang efektif.

2.2.2 Administrasi pada Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, sistem administrasi lebih berfokus pada pengelolaan tanah dan penyelenggaraan urusan gereja serta sistem feodal. Di Eropa, pemerintahan dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan status sosial dan pengaruh politik.

Birokrasi pada zaman feodal cenderung sangat terbatas dan informal. Para penguasa mengandalkan kekuatan lokal dan sistem patronase untuk mengelola wilayah mereka. Administrasi publik yang ada lebih mengutamakan pengumpulan pajak dan pemeliharaan ketertiban sosial. Beberapa ciri dari abad pertengahan atau era pra modern atau era klasik adalah:

1. Administrasi pada masa ini bersifat desentralisasi, dengan penguasa lokal yang memiliki otonomi besar.
2. Penunjukan pejabat lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan loyalitas daripada kemampuan.
3. Fungsi administrasi lebih banyak mengurus pajak, pengumpulan sumber daya, dan pengendalian penduduk.
4. Praktik-praktik ini menjadi dasar bagi pengembangan birokrasi modern di masa berikutnya.

Masa Klasik atau Era Pra-Modern merupakan fondasi awal bagi administrasi publik yang berpusat pada kekuasaan

pribadi dan tradisi. Menurut Dwight Waldo (1948) "Before the rise of modern states, administration was inseparable from the personal rule of monarchs." Meski belum memiliki sistem birokrasi rasional dan formal, praktik-praktik dan nilai-nilai moral dari masa ini menjadi cikal bakal perkembangan administrasi publik modern. "The early forms of administration served primarily the interests of the ruler and lacked formal organization." Woodrow Wilson, *The Study of Administration* (1887).

2.2.3 Era Modern Awal (Abad ke-18 dan ke-19)

1. Pemikiran tentang Administrasi Publik pada Abad ke-18

Memasuki abad ke-18, para pemikir seperti Montesquieu dan Rousseau mulai menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dan reformasi administrasi negara. Montesquieu, dalam bukunya *The Spirit of the Laws* (1748), menekankan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Di Eropa, dengan berkembangnya sistem negara-bangsa, administrasi publik mulai membutuhkan sistem yang lebih terorganisir dan formal. Administrasi publik, yang sebelumnya lebih bersifat pribadi dan informal, mulai mendapatkan pembaruan yang lebih sistematis, terutama terkait dengan pengelolaan pajak dan pengelolaan keuangan negara.

2. Revolusi Industri dan Pembentukan Birokrasi

Revolusi Industri yang dimulai di Inggris pada akhir abad

ke-18 memberikan dampak besar pada struktur pemerintahan dan administrasi publik. Negara-negara mulai melihat perlunya pembentukan birokrasi yang lebih terstruktur untuk mengelola perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Di Jerman, Max Weber, seorang ahli sosiologi, menyusun teori mengenai birokrasi yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mengorganisir pemerintahan dengan cara yang rasional dan efisien.

Weber mengemukakan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang memiliki karakteristik formal, aturan yang jelas, hirarki yang terstruktur, dan pemisahan yang jelas antara administrasi dan politik. Pemikiran ini menjadi dasar bagi perkembangan sistem birokrasi di banyak negara modern.

Abad ke-19 menandai transisi penting dalam perkembangan administrasi publik di dunia Barat, terutama sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Revolusi Industri, perluasan pemerintahan nasional, dan perkembangan birokrasi negara modern menuntut sistem administrasi yang lebih terorganisir dan efisien. "The 19th century was the century of bureaucratic expansion and the professionalization of public administration." James E. Anderson (1975).

Pada masa ini, administrasi publik mulai dibedakan dari politik, walaupun keduanya masih sangat terkait. Fokus utama pada masa ini adalah membangun sistem birokrasi yang profesional dan menata organisasi

pemerintahan secara rasional.

3. Ciri-ciri Masa Modern Awal dalam Administrasi Publik

Beberapa ciri masa modern awal ini seperti:

- a. Pemisahan Administrasi dan Politik: Pemikiran bahwa administrasi harus bebas dari pengaruh politik partisan agar efisien dan objektif.
- b. Pengembangan Birokrasi Rasional: Pengorganisasian pemerintah secara sistematis dan hierarkis berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas.
- c. Profesionalisme dan Meritokrasi: Penekanan pada sistem pengangkatan pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena hubungan politik atau patronase.
- d. Sentralisasi Kekuasaan: Pemerintah pusat memperkuat kontrol atas wilayahnya melalui birokrasi yang terstruktur.
- e. Standarisasi Prosedur Kerja: Peraturan dan prosedur formal mulai diterapkan untuk menjamin konsistensi dan kepastian dalam pelayanan publik.

4. Tokoh Penting dan Pemikiran Kunci

Beberapa tokoh penting masa modern awal ini yaitu:

- a. Max Weber (1864–1920): Meskipun lebih aktif di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Weber sangat berpengaruh dalam mengembangkan konsep birokrasi rasional sebagai model organisasi modern. Ia menekankan struktur hierarki, aturan formal, dan kepegawaian berdasarkan merit. "Bureaucracy is the most rational and efficient form of administration because it is based on a clearly defined hierarchy and

impersonal rules. Max Weber, *Economy and Society* (1922)

- b. Woodrow Wilson (1865–1924): Mengajukan pemisahan administrasi publik dari politik agar birokrasi dapat berjalan efektif dan efisien.
 - c. Charles-Jean de la Vallée Poussin: Menekankan pentingnya organisasi yang sistematis dan pengelolaan administrasi pemerintahan secara ilmiah.
5. Perkembangan dan Implementasi
- a. Pemerintahan modern mulai membangun sistem administrasi yang lebih terstruktur, misalnya di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.
 - b. Mulai diterapkan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen pegawai negeri sebagai upaya menghilangkan praktik patronase politik.
 - c. Birokrasi sebagai instrumen negara memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sosial.

2.2.4 Administrasi Publik pada Abad ke-20

Awal abad ke-20 merupakan masa penting dalam perkembangan administrasi publik karena munculnya upaya sistematis untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Pada periode ini, administrasi publik mulai dipandang tidak hanya sebagai praktik manajerial biasa, tetapi sebagai bidang keilmuan yang membutuhkan teori, prinsip, dan metode khusus.

Era ini sangat dipengaruhi oleh revolusi industri, pertumbuhan organisasi pemerintahan yang semakin besar,

dan kebutuhan akan manajemen yang lebih efisien dalam birokrasi modern. Menurut Leonard D. White (1926) menyatakan "Public administration is the detailed and systematic application of law. It is the activity of government officials in the executive branch of government, the management of public affairs."

1. Administrasi Publik pada Awal Abad ke-20

Pada awal abad ke-20, administrasi publik mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari politik. Pada tahun 1887, Woodrow Wilson dalam artikelnya "The Study of Administration" menyatakan bahwa administrasi harus dipisahkan dari politik untuk memastikan efisiensi pemerintahan. Wilson mengusulkan agar administrasi negara dikelola oleh profesional yang berkompeten, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.

2. Reformasi Progresif dan Pengembangan Manajemen Ilmiah

Gerakan reformasi progresif pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat mendorong penguatan administrasi publik. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mengurangi pengaruh politik dalam administrasi dan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Frederick Taylor, yang mengembangkan prinsip scientific management. Konsep Taylor tentang penggunaan metode ilmiah dalam manajemen menginspirasi penerapan prinsip-prinsip efisiensi dalam administrasi publik.

Pada tahun 1911, Frederick Taylor dalam bukunya *The*

Principles of Scientific Management menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dengan menggunakan data dan pengukuran ilmiah untuk meningkatkan produktivitas.

3. Tokoh Penting dan Kontribusi

Beberapa tokoh penting administrasi publik abad 20 ini yaitu:

- a. Woodrow Wilson (1887): Dianggap sebagai bapak administrasi publik modern, Wilson memisahkan administrasi publik dari ilmu politik dan menekankan pentingnya efisiensi serta profesionalisme dalam pemerintahan. Beliau menyatakan "Administration is detailed and systematic execution of public law. It is the detailed and systematic application of laws by the executive branch."
- b. Leonard D. White: Mengembangkan administrasi publik sebagai disiplin akademik, menekankan kajian ilmiah terhadap prinsip dan praktik administrasi pemerintahan.
- c. Frank J. Goodnow: Menegaskan pentingnya membedakan antara politik dan administrasi agar birokrasi dapat berfungsi secara efisien dan profesional.

4. Ciri-ciri Era Ilmu Administrasi

- a. Pendekatan Ilmiah dan Sistematis: Penggunaan metode ilmiah untuk mempelajari praktik administrasi agar menjadi lebih efisien dan efektif.
- b. Pemahaman Administrasi sebagai Disiplin Terpisah: Administrasi dipandang sebagai bidang studi yang berbeda dari ilmu politik dan hukum.
- c. Penekanan pada Efisiensi dan Profesionalisme: Fokus

pada cara mengelola organisasi publik secara lebih sistematis dan rasional.

- d. Pengembangan Prinsip-prinsip Manajemen: Munculnya prinsip-prinsip seperti pembagian kerja, hierarki, dan otoritas yang terstruktur.
5. Pengaruh Terhadap Administrasi Publik
 - a. Administrasi publik mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang harus diajarkan secara khusus di perguruan tinggi.
 - b. Pembentukan teori-teori manajemen birokrasi yang berfokus pada struktur organisasi dan aturan formal.
 - c. Penekanan pada pembentukan birokrasi yang profesional, terorganisir, dan efisien.
 - d. Membuka jalan bagi teori-teori administrasi selanjutnya seperti teori birokrasi Weber dan teori manajemen klasik.

2.2.5 Administrasi Publik pada Era New Deal dan Pasca-Perang Dunia II

1. Program New Deal dan Perkembangan Administrasi Publik di Amerika Serikat

Pada masa pemerintahan Franklin D. Roosevelt, program New Deal yang diluncurkan pada 1933 membawa perubahan besar dalam administrasi publik di Amerika Serikat. Pemerintah AS mulai memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui pembentukan berbagai lembaga administratif yang bertugas mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial.

Periode ini juga memperkenalkan konsep-konsep baru

dalam administrasi publik, seperti pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik di dalam birokrasi.

2. Pengaruh Globalisasi dan Administrasi Publik Pasca-Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II, administrasi publik di banyak negara berkembang menuju modernisasi yang lebih terorganisir dan efisien. Dalam periode ini, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memperkenalkan standar pengelolaan administrasi publik yang lebih universal, yang berfokus pada keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik.

2.2.6 Era Neo-Liberalisme dan Administrasi Publik di Akhir Abad ke-20

Pada era sebelum 1970-an, administrasi publik lebih banyak dipahami melalui pendekatan klasik dan perilaku yang fokus pada struktur, aturan, dan efisiensi birokrasi. Namun, memasuki tahun 1970-an, muncul kritik terhadap pendekatan tradisional tersebut yang dianggap terlalu mekanistik dan tidak cukup memperhatikan hasil nyata, kualitas pelayanan publik, dan dinamika perubahan sosial.

Era Baru Administrasi Publik (New Public Administration/NPA) lahir sebagai respons atas keterbatasan teori administrasi klasik dan birokrasi tradisional. NPA berupaya menyesuaikan administrasi publik dengan tuntutan sosial, demokrasi, dan keadilan. Menurut Dwight Waldo (1948) "The New Public Administration seeks to make

administration more responsive to the needs of the society, emphasizing social equity and participation.”

1. Gerakan Neo-Liberalisme dan Pengurangan Peran Negara
Pada 1980-an, dengan munculnya gerakan neo-liberalisme yang dipelopori oleh Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris, administrasi publik mengalami perubahan signifikan. Fokus utama pada periode ini adalah efisiensi dan pengurangan peran negara dalam penyediaan layanan publik. Banyak negara mengadopsi kebijakan untuk mengurangi belanja publik dan mendorong sektor swasta untuk mengambil alih beberapa fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab negara.
2. New Public Management (NPM)
New Public Management (NPM) muncul pada periode ini sebagai paradigma baru dalam administrasi publik yang mengedepankan efisiensi manajerial yang lebih besar, pengurangan biaya, dan orientasi pada hasil. Konsep NPM ini menekankan penggunaan teknik manajerial yang berasal dari sektor swasta dalam pemerintahan, seperti pengelolaan berbasis kinerja dan penekanan pada kepuasan pelanggan.
3. Karakteristik dan Fokus Era Baru Administrasi Publik
Menurut H. George Frederickson dalam bukunya *The Spirit of Public Administration* (1996) menyatakan “The New Public Administration embraces value-based, action-oriented research, emphasizing social equity, democratic citizenship, and public service.” Beberapa karakteristik Era baru:

- a. Penekanan pada Keadilan Sosial: Administrasi publik tidak hanya soal efisiensi dan efektivitas, tetapi juga keadilan sosial dan pemerataan pelayanan.
 - b. Partisipasi dan Demokrasi: Melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar birokrasi top-down.
 - c. Pengelolaan Berbasis Hasil (Performance-Oriented): Fokus pada outcome dan dampak nyata dari kebijakan dan pelayanan publik.
 - d. Responsivitas dan Akuntabilitas: Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan publik dan bertanggung jawab atas kinerjanya.
 - e. Interdisipliner dan Adaptif: Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan menyesuaikan dengan lingkungan yang dinamis dan kompleks.
4. Tokoh dan Kontribusi Penting
- a. Dwight Waldo: Mengkritik administrasi publik tradisional yang terlalu teknis dan mendorong agar administrasi lebih memperhatikan nilai-nilai sosial dan politik.
 - b. H. George Frederickson: Mengembangkan konsep "New Public Service" yang mengedepankan pelayanan publik sebagai kewajiban sosial dan demokratis.
 - c. Paul Appleby: Menyatakan administrasi publik harus melayani kepentingan masyarakat luas, bukan sekedar efisiensi birokrasi.
 - d. Robert T. Golembiewski: Fokus pada perubahan dalam administrasi publik yang harus berorientasi pada hasil dan fleksibilitas.

5. Perkembangan dan Implementasi

Era Baru Administrasi Publik kemudian berkembang ke berbagai konsep dan model, seperti:

- a. New Public Management (NPM): Mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah.
- b. Governance: Konsep pemerintahan yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil.
- c. Digital Government dan E-Government: Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi.
- d. Public Value Management: Pendekatan yang menitikberatkan pada penciptaan nilai publik bagi masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi.

Perkembangan disampaikan oleh Christopher Hood dalam bukunya *A Public Management for All Seasons?* (1991) yang menyatakan "New Public Management represents a shift towards decentralized, market-oriented management techniques to improve public sector performance."

6. Kritik dan Tantangan Era Baru Administrasi Publik

- a. Meski lebih responsif, NPA dan NPM juga mendapat kritik karena terlalu menekankan aspek manajerial dan pasar sehingga bisa mengabaikan nilai-nilai sosial.
- b. Risiko fragmentasi karena desentralisasi dan partisipasi yang luas.
- c. Tantangan dalam mengukur "nilai publik" dan keadilan sosial secara konkret.

d. Adaptasi teknologi memunculkan isu privasi dan kesenjangan digital.

Era Baru Administrasi Publik merupakan transformasi penting dari pendekatan administrasi tradisional yang fokus pada aturan dan efisiensi ke pendekatan yang lebih humanistik, demokratis, dan berorientasi hasil. Era ini mendorong pemerintah agar lebih responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap kompleksitas masyarakat modern.

2.2.7 Administrasi Publik di Abad ke-21

1. Perkembangan Kontemporer Administrasi Publik

Di abad ke-21, administrasi publik semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat global. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyelenggaraan administrasi publik yang lebih transparan, responsif, dan berbasis data.

2. Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik

Beberapa isu yang berkembang dalam administrasi publik modern meliputi pentingnya akuntabilitas, partisipasi publik, dan transparansi. Negara-negara kini lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Sejarah administrasi publik mencerminkan perubahan besar dalam cara negara mengelola administrasi dan memberikan pelayanan publik. Dari era klasik yang sederhana

hingga birokrasi modern yang efisien, administrasi publik terus berkembang dengan tantangan-tantangan baru, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Peran administrasi publik yang semakin penting menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang baik dan efisien sangat bergantung pada administrasi yang baik pula.

2.3 Perkembangan Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik pemerintahan mengalami berbagai perkembangan signifikan sepanjang sejarah. Seiring dengan berjalannya waktu, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjalankan kebijakan negara, tetapi juga berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks dan efisien dalam melayani masyarakat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas perkembangan administrasi publik dari berbagai perspektif, mulai dari awal abad ke-20 hingga abad ke-21.

2.3.1 Perkembangan Administrasi Publik pada Awal Abad ke-20

1. Administrasi Publik sebagai Disiplin Ilmu

Pada awal abad ke-20, administrasi publik mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari politik. Sebelumnya, administrasi publik lebih berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tanpa teori yang mendalam. Tetapi, setelah era Reformasi

Progresif di Amerika Serikat, muncul pemikiran bahwa administrasi perlu dipelajari secara ilmiah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitasnya.

Woodrow Wilson, dalam karya monumentalnya *The Study of Administration* (1887), menyatakan bahwa administrasi harus dipisahkan dari politik dan dikelola oleh profesional yang terlatih. Ia menekankan bahwa administrasi adalah bagian dari kegiatan bisnis yang bersifat teknis, bukan ideologis atau politis. Pemikiran ini menandai pentingnya profesionalisme dalam administrasi publik. Woodrow Wilson (1887) menyatakan "The field of administration is a field of business. It is therefore not connected with politics. It is the part of the government that deals with the practical, administrative work, and not the form of policy."

2. Reformasi Progresif dan Pengaruhnya pada Administrasi Publik

Gerakan progresif di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 berfokus pada upaya untuk mereformasi administrasi pemerintah yang dianggap korup dan tidak efisien. Reformasi ini mendorong pemisahan antara administrasi dan politik, serta menekankan pentingnya meritokrasi dan kompetensi dalam birokrasi. Ini adalah langkah penting dalam transisi administrasi publik dari sistem yang dipengaruhi oleh patronase politik menjadi sistem yang lebih profesional dan berbasis pada keahlian. Menurut Frederick Taylor (1911) "In the past, the business of government was done by men of politics. The men of science can now do it better."

Frederick Taylor, meskipun lebih dikenal dalam bidang manajemen, juga memberikan kontribusi penting untuk administrasi publik melalui teori manajemen ilmiah. Taylor mengusulkan bahwa pengelolaan yang efisien dapat dicapai dengan menerapkan prinsip ilmiah dalam manajemen, yang kemudian diadaptasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi.

2.3.2 Perkembangan Administrasi Publik pada Pertengahan Abad ke-20

1. Administrasi Publik pada Masa New Deal

Era New Deal yang diprakarsai oleh Presiden Franklin D. Roosevelt pada tahun 1933 menandai perubahan besar dalam administrasi publik di Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk mengatasi dampak besar dari Depresi Besar dengan memperkenalkan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang melibatkan peningkatan peran pemerintah. Dalam konteks ini, administrasi publik menjadi lebih terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang lebih aktif.

Selama periode ini, administrasi publik berkembang pesat dengan pembentukan banyak lembaga baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan New Deal, seperti Social Security Administration dan Works Progress Administration. Hal ini memperkenalkan konsep bahwa pemerintah tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban, tetapi juga harus aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Menurut

Franklin D. Roosevelt (1937) "The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much; it is whether we provide enough for those who have little."

2. Profesionalisme dan Birokrasi

Pada paruh pertama abad ke-20, administrasi publik juga dipengaruhi oleh teori-teori manajemen, terutama teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber mengemukakan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien, dengan struktur hierarkis yang jelas dan prosedur yang baku. Pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem birokrasi di banyak negara modern. Max Weber (1922) menyatakan "Bureaucracy is a way of organizing labor in which every person is assigned a specific task, responsibility, and a clear set of rules."

Weber mengidentifikasi karakteristik birokrasi yang mencakup adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki yang ketat, dan penggunaan aturan formal untuk mengelola administrasi. Prinsip ini diterapkan di banyak negara pada abad ke-20, terutama di negara-negara industri yang berkembang.

2.3.3 Administrasi Publik pada Akhir Abad ke-20

1. Munculnya New Public Management (NPM)

Pada akhir abad ke-20, terutama pada 1980-an, terjadi pergeseran paradigma dalam administrasi publik dengan munculnya konsep New Public Management (NPM). NPM adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip

manajemen sektor swasta dengan sektor publik, dengan fokus pada efisiensi, hasil, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. NPM menekankan pentingnya pengukuran kinerja, pengurangan birokrasi, dan pengelolaan berbasis hasil.

Konsep ini diperkenalkan oleh tokoh seperti Christopher Hood, yang menilai bahwa administrasi publik seharusnya beroperasi lebih seperti perusahaan swasta, dengan lebih memperhatikan hasil yang dicapai dan kepuasan pelanggan. Christopher Hood (1991) menyatakan "New Public Management emphasizes results, efficiency, and cost-effectiveness in the delivery of public services."

Penerapan prinsip-prinsip NPM ini dapat dilihat pada kebijakan privatisasi dan desentralisasi yang berkembang di banyak negara pada masa ini. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat mengadopsi prinsip-prinsip ini untuk memperbaiki efisiensi layanan publik dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

2. Pengaruh Teknologi dan Globalisasi

Selain NPM, pada akhir abad ke-20, administrasi publik juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan proses globalisasi. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk administrasi publik yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat, komunikasi yang lebih efisien antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Di sisi lain, globalisasi membawa tantangan baru bagi

administrasi publik, terutama dalam hal pengelolaan kebijakan yang tidak hanya berdampak pada negara tertentu, tetapi juga di tingkat internasional. Negara-negara harus mengelola hubungan internasional dan menghadapi masalah global seperti perubahan iklim dan terorisme yang memerlukan kolaborasi antar negara.

2.3.4 Administrasi Publik di Abad ke-21

1. Administrasi Publik yang Responsif dan Akuntabel

Memasuki abad ke-21, administrasi publik semakin berfokus pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik. Negara-negara semakin menuntut agar birokrasi lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta lebih terbuka dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus lebih akuntabel dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik.

Di banyak negara, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan semakin diperkuat. Pendekatan *good governance* yang melibatkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi salah satu fokus utama administrasi publik modern. United Nations (1997) menyatakan "Good governance is about the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)."

2. Digitalisasi dan E-Government

Digitalisasi adalah salah satu perkembangan terbesar dalam administrasi publik pada abad ke-21. Pemerintah di berbagai negara mulai mengimplementasikan sistem *e-government*, yang memungkinkan masyarakat untuk

mengakses layanan pemerintah secara online, serta mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi.

E-government membuka era baru dalam pengelolaan administrasi publik, di mana teknologi informasi digunakan untuk memperbaiki layanan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintahan yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perkembangan administrasi publik menunjukkan transformasi besar dari sistem yang sederhana dan terpusat pada penguasa menjadi sistem yang lebih efisien, transparan, dan berbasis hasil. Dari pemisahan administrasi dan politik yang pertama kali dicetuskan oleh Wilson, hingga munculnya NPM dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik, disiplin ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Administrasi publik masa depan akan semakin terfokus pada prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi yang didukung oleh kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Hood, *The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme*. 1991.
- Dwight Waldo, *The Administrative State*, influential in shaping later NPA ideas. 1948.
- Franklin D. Roosevelt, *Second Inaugural Address*. 1937.
- H. George Frederickson, *The Spirit of Public Administration*. 1996.
- Hood, Christopher. *The New Public Management in the 1980s: Variations on a Theme*. 1991.
- Kettl, Donald F. *The Global Public Management Revolution*. 2005.
- Leonard D. White, *Introduction to the Study of Public Administration*. 1926.
- Rosenbloom, David. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 2008.
- Stillman, Richard J. *Public Administration: Concepts and Cases*. 2000.
- Taylor, Frederick. *The Principles of Scientific Management*. 1911.
- United Nations, *Governance for Sustainable Human Development*. 1997.
- Weber, Max. *Economy and Society*. 1922.
- Wilson, Woodrow. "The Study of Administration." 1887.

BAB 3

TEORI DAN PENDEKATAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh: Muhammad Iqbal, SE.,MM.

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dan lembaga publik mengelola sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam memahami administrasi publik, berbagai teori dan pendekatan dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana organisasi publik bekerja dan bagaimana manajemen yang efektif dapat dicapai.

Teori Klasik merupakan landasan awal dalam administrasi publik yang menekankan pada struktur organisasi, pembagian kerja, hierarki, dan prinsip-prinsip manajemen seperti yang dikemukakan oleh Henri Fayol dan Frederick Taylor. Teori ini menekankan efisiensi dan kontrol yang ketat dalam organisasi.

Sebagai respons terhadap keterbatasan teori klasik, Teori Human Relations muncul dengan fokus pada aspek manusia dalam organisasi, seperti motivasi, komunikasi, dan hubungan interpersonal. Elton Mayo melalui eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan sosial dan psikologis pegawai dapat meningkatkan produktivitas. Teori Sistem melihat organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang saling berinteraksi dengan

BIODATA PENULIS



Dr. Sitti Hairani Idrus, S.Sos., M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo Kendari

Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 07 Juli 1983. Penulis adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari sejak tahun 2015. Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2005. Strata Dua (S2) pada Program Studi Administrasi Pembangunan Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2012. Tingkat Doktoral (S3) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Unit Jaminan Mutu (UJM) Fakultas Ilmu Administrasi UHO pada tahun 2015-2017, Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis FISIP UHO pada tahun 2017-2019, Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis FISIP UHO pada tahun 2023 s/d sekarang. Penulis telah melakukan beberapa kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, mengikuti berbagai pelatihan, menjadi presenter pada Seminar Ilmiah Nasional dan Internasional serta telah mempublikasi beberapa artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Secara kolaboratif ikut menulis beberapa buku yaitu Buku Bunga Rampai Penginderaan

Jauh (2021), Buku Filsafat Administrasi Publik (2024).

Penulis dapat dihubungi melalui *email*: sitihairani@uho.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Jen Surya, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Banda Aceh

Diploma-Akuntansi, Sarjana Ekonomi-Akuntansi, dan Magister Sains Akuntansi ditamatkan pada FE Universitas Syiah Kuala tahun 1996, 1999 dan Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala lulus 2007. Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi Perencanaan dan Ekonomi Regional Universitas Syiah Kuala selesai 2017. Sejak tahun 2000 aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Selain aktif sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai konsultan pendirian UPTD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta juga sebagai staf ahli, penasehat dan narasumber pada beberapa Biro/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Seperti: Biro Ekonomi, Biro Keistimewaan, BAPPEDA, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit, serta beberapa Lembaga/Unit dibawah SKPD. Aktif juga sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Konsultan Keuangan pada Kantor Jasa Akuntansi (KJA). Selain mengelola

bisnis konsultan dalam bidang keuangan, audit, serta pengembangan manajemen dan bisnis baik berbasis konvensional maupun Syariah Islam, Penulis juga telah menulis beberapa buku yang berhubungan dengan Akuntansi, Keuangan, Bisnis dan Manajemen, serta Ekonomi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zein.aquarius@yahoo.com (Pribadi) atau jen.surya@ar-raniry.ac.id (Official).

BIODATA PENULIS



Muhammad Iqbal, SE., MM

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry
Banda Aceh

Lulus Sarjaan (S1) akuntansi di FE Universitas Merdeka Malang 1996, Magister (S2) Magister Manajemen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pernah menjadi dosen di Universitas Gunadarma Jakarta dan beberapa perguruan tinggi di Banda Aceh.

Sebagai penulis buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Akuntansi sektor publik : pendekatan peraturan akuntansi daerah, Manajemen Strategis pendekatan rencana strategis lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan daerah di Indonesia : raw model Balai Pelatihan Kesehatan Aceh, Kewirausahaan, Konsep dan Praktik Bisnis, Strategi pemasaran, teknologi digital pada bidang pemasaran.

Selain sebagai dosen juga aktif sebagai konsultan keuangan, manajemen, dan bisnis, tenaga ahli, serta Auditor di beberapa Kantor Akuntan Publik.

Saat ini sedang menyelesaikan studi Doktoral (S3) Fiqh Modern Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iqbal.malang01@gmail.com (Pribadi) atau iqbal@ar-raniry.ac.id (Official).

BIODATA PENULIS



Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos., M.Si

Universitas Nusa Cendana

Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang Ilmu Administrasi Publik. Saat ini, Beliau mengabdikan sebagai dosen pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia. Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di mana beliau berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2022. Perjalanan akademiknya semakin memukau dengan pencapaian beasiswa LPDP untuk studi doktoral.

Penulis menyelesaikan studi doktoralnya dalam waktu 2 tahun 11 bulan, sebuah prestasi yang mengagumkan, dengan disertasi berjudul "Sustainability Inovasi Sektor Publik." Kepakaran penulis meliputi berbagai bidang, termasuk manajemen dan organisasi, teori dan administrasi pembangunan, administrasi publik, inovasi sektor publik, perencanaan strategis dan pengembangan kinerja, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, pengadaan publik, desentralisasi, dan bibliometrik.

Sebagai seorang penulis yang produktif, penulis telah membagikan pengetahuannya melalui berbagai karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terkemuka, seperti International

Journal of Public Sector Management (Scopus Q1), Administration & Society (Scopus Q1), dan Journal of Social and Political Sciences (Scopus Q3), serta jurnal nasional terakreditasi lainnya seperti Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik pada Universitas Gadjah Mada dan Jurnal Bisnis & Birokrasi pada Universitas Indonesia. Keahlian dan dedikasinya dalam bidang ini tidak hanya menginspirasi para akademisi dan peneliti, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut atau kerjasama akademik, Penulis dapat dihubungi melalui Email: yoga.pradana@staf.undana.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dra. Titis Srimurni, M.Si
Universitas Lumajang

Penulis adalah dosen Dpk LLDIKTI VII Jawa Timur yang ditugaskan sebagai dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lumajang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dan menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Adminsitrasi Universitas Jember

BIODATA PENULIS



Dr.Rukiah Nggilu.S.Ip.,M.Si

Dosen Program Magister Ilmu Administasi (S2) Pada Pascajasajana Universitas Bina Taruna Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tanggal 23 Maret 1965. Penulis adalah dosen tetap pada Program Magister Ilmu Administrasi (S2) pada Pascasarjana Univeristas Bina Taruna Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Jurusan Program Studi Administrasi Pembangunan Program Pascasarjana pada Universitas Hasanuddin Makassar, serta S3 pada Program Pascasarjana Pendidikan Doktor. Penulis menekuni bidang Menulis Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nggilurukiah23365@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.

Dosen Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Tunas Pemuda, Tangerang Banten

Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang.

BIODATA PENULIS



Dr. Mokh. Hariyadi Eko Romadon, S.Sos., M.Si.

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik/Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lumajang Jawa Tmur

Penulis lahir di Lumajang Jawa Timur, tanggal 13 Desember 1966. Penulis adalah dosen PNS LLDikti Wilayah VII Jawa Timur DPK pada Universitas Lumajang. Pendidikan dasar dan menengah SDN, SMPN1, SMAN1 di Lumajang. Menyelesaikan pendidikan S-1 di FISIP Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ilmu Pemerintahan lulus tahun 1994, dan melanjutkan S-2 di PSDM Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Ilmu Pemerintahan lulus tahun 2004. Juga menempuh pendidikan S-2 di Pascasarjana UNEJ Jember dan Pascasarjana UPN Veteran Surabaya. Kemudian menyelesaikan pendidikan S-3 di FISIP Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Ilmu Sosial lulus tahun 2012.

Memperoleh beasiswa dari Yayasan Damandiri untuk penulisan Tesis Tahun 2004. Juga beasiswa BPPS dari Kemenristek Dikti untuk studi Dalam Negeri S-2 Tahun 2001 dan untuk studi S-3 Tahun 2005 di UNAIR Surabaya, dan beasiswa Luar Negeri *Sandwich Like Programme* Tahun 2012 di Universiteit van Amsterdam (UvA) Belanda Jurusan *Phenomenology* dan di Amsterdam Intitute Social Science Research (AISSR) Belanda

Jurusan *Hermeneutics. Summer School* tahun 2024 di UiTM Malaysia. Juga menjadi pembicara/nara sumber di berbagai seminar, workshop, FGD, lokakarya, simposium, dll, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional (kementerian).

Sudah banyak penghargaan yang pernah diterima oleh penulis, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, namun hanya yang tingkat nasional saja dituliskan, beberapa diantaranya: Penganugerahan **Satya Lencana (SL) Seroja** karena penugasan ke Timor-Timur dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tahun 1994; Penghargaan **Karya Satya** pengabdian 10 tahun dari Presiden RI Tahun 2014. Pemenang **Keluarga Harmonis dan Sejahtera (Terbaik Pertama/Juara 1)** Provinsi Jawa Timur pada puncak acara HARGANAS XV (Hari Keluarga Nasional) tahun 2008 dan **Favorit Keluarga Harmonis dan Sejahtera** Nasional pada acara Temu Kader di Jakarta 2008; Sebagai Pembina Lomba Budi Daya Ikan Karamba (Juara II Nasional) memperoleh penghargaan **Adi Bhakti Mina Bahari** tahun 2009 dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Freddy Numberi; Sebagai Ketua Forum Lumajang Sehat (2006-2018) memperoleh penghargaan **Swasti Saba Wistara (Emas)** tahun 2007, 2009, 2013, 2015, dan 2017 untuk penghargaan tertinggi sebagai kabupaten/kota sehat dari Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI; *Member of Indonesian Academic Leader Course (IALC) Program DAAD Pemerintah Jerman* Sejak Tahun 2013; Sebagai Tim Finalisasi Penyusunan **Penghargaan Proklim Lestari** Tahun 2022 dan memperoleh penghargaan nasional dari Menteri KLHK RI untuk Kampung Karamba RW.05 Kelurahan Ditotrunan (di kampung penulis); Nominator Nasional (dua orang, dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Kupang Prov. NTT) Penerima **penghargaan KALPATARU Katagori Pengabdian Lingkungan** Tahun 2022; Penghargaan **Terbaik Nasional dan hanya satu-satunya Korpri Award 2023 Katagori**

Inspiring dari Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia pada Puncak Acara HUT Korpri ke-52 di Jakarta.

Riwayat pekerjaan/jabatan akademik: Dosen Yayasan di Universitas Lumajang sejak Tahun 2000; Dosen PNS Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (Sekarang menjadi Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII Jawa Timur) DPK pada Universitas Lumajang sejak tahun 2005; Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lumajang (Periode 2005-2009); Pembantu Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM) Universitas Lumajang (Periode 2009-2014); Rektor terpilih (Periode 2014-2018); Rektor terpilih (Periode 2018-2023); Ketua Senat Universitas Lumajang (Periode 2023-2028). Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang dua periode (2012 s.d. 2022). Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dua periode (2018-sekarang) Kabupaten Lumajang Pernah mengikuti Kursus Singkat Siswa Sekolah Staf Komando (**SESKO TNI**) di Bandung (Anggota Terpilih & Terbatas) Tahun 2002. Alumni Pemantapan Nilai-nilai (TAPLAI) Kebangsaan Angkatan ke-4 atau Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK 148) Lembaga Ketahanan Nasional (**LEMHANNAS RI**) Tahun 2021. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: moharerounilu@gmail.com atau HP: 0811356172

BIODATA PENULIS



Wilda Sumarsyah, S. I. P., M. A. P

Dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya

Penulis lahir di Titisan Tunggang, 21 September 1989. Dosen PNS di universitas negeri surabaya. S1 di Umiversitas Andalas Padang pada program studi ilmu administrasi negara dan s2 di universitas andalas padang jurusan administrasi publik. Konsentrasi pada kebijakan publik. Email : wildasumarsyah@unesa.ac.id